



**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

**RENJA
PERUBAHAN**

2025

**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOMPLEKS PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI 2
JALAN WOTER MONGINSIDI TENGGARONG 75511 Email: pppa.kabkukar@yahoo.com / dinaspppa.kukarkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : **P-4/DP3A/000.7/01/2024**

T E N T A N G
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah di ubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

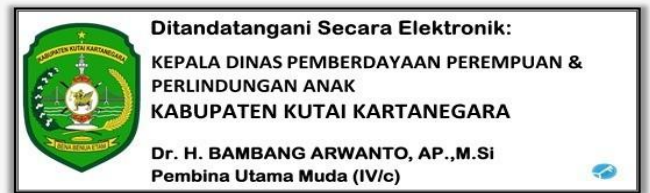
- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 221 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026;
 9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - d. merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara tepat waktu;
 - g. melaporkan hasilnya pada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku Pengguna Anggaran.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 24 Januari 2024



Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara ;
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI
KARTANEGRA
NOMOR : **P-4/DP3A/000.7/01/2024**
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025

- a. Pengarah/Penanggung Jawab : Kepala Dinas
- b. Ketua : Sekretaris
- c. Sekretaris : Sub Koord Penyusunan Program dan Keuangan
- Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan,Kualitas Keluarga Data dan Informasi
 - 2. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
 - 3. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
 - 4. Kepala Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Ketatalaksanaan.
 - 6. Sub Koord Penggerak Swadaya Masyarakat
 - 7. Sub Koord Pengawas Pembimbing Kemasyarakatan

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 24 Januari 2024





Ditandatangani Secara Elektronik:
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN &
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dr. H. BAMBANG ARWANTO, AP.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, didasari atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamankan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu di susun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang di laksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 – 2025. Lebih lanjut isi dari Renja Perubahan ini adalah gambaran perencanaan berbagai rencana pembangunan yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai program dan kegiatan serta memperhatikan berbagai kondisi dan potensi lokal yang akan menjadi bagian dalam proses pembangunan di masa-masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, diharapkan rencana kerja ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 02 September 2025

Kepala Dinas


H.Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si
NIP.19711122 200003 1002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	10
1.3. Maksud dan Tujuan.....	12
1.4. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	 14
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja P Tahun lalu dan Capaian Renstra	14
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	 29
3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	29
 BAB V PENUTUP.....	 55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah secara sistematis terarah terpadu menyeluruh dan tanggapan terhadap perubahan yang berjangka panjang, menengah dan jangka pendek, sebagaimana di amanatkan dalam UU nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah harus menyusun rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja P-OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana kerja Perubahan (Renja-) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah juga melaksanakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dimana penyelenggaraan Tata Pemerintah melakukan Pengintegrasian Gender melalui kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran.



Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis dan implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 di mana Renja Perubahan merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 1(satu) tahunan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam Rencana Kerja memuat visi misi tujuan kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan berorientasi pada hasil yang akan di capai selama kurun waktu 1 tahun .

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang Sosial Budaya, Ekonomi, Politik dan Keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Dalam RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sesuai Visi Bupati yaitu : **“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”** diamanatkan lima misi pembangunan Kutai



Kartanegara dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masuk pada misi ke dua yaitu “MENINGKATNYA PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA, UNGGUL DAN BERBUDAYA “

Dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai OPD pendukung yang juga mempunyai tanggungjawab terhadap terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Terdapat beberapa persoalan-persoalan pembangunan yang telah dirumuskan dan harus segera diatasi yaitu belum optimalnya peranan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan (kesetaraan gender). Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan rencana kerja dalam rangka penentuan kebijakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam misi ke dua RPJMD pembangunan tersebut.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun pelaksanaan Penyusunan Rencana Perubahan (Renja P) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 memperhatikan kepada peraturan Perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Renja dan arah garis kebijakan terkait yang di rumuskan antara lain :

- 1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonnesia nomor 4438;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara



Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 17) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembaguan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 19) Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-645/BAPP/065.11/03/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari dibuatnya Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah :

1. Untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2026.
2. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Pembangunan Daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.



Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

- 1 Menciptakan keterpaduan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai Visi Misi Pemerintah Daerah.
- 2 Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur.
- 3 Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan Operasional Tahunan dalam rentang waktu 1 tahun.
- 4 Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

BAB III RENACANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja –PD

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Perangkat Daerah adalah merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) tahun 2025. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdapat beberapa kendala terkait dengan diberlakukannya system SIPD RI, Dimana system ini merupakan system satu pintu dari Kementrian Dalam Negeri yang harus digunakan baik dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan. Terkendala dengan Anggaran Kas yang diinput dalam SIPD RI, sehingga perlu beberapa kali pergeseran anggaran kas dan hal ini menyita waktu Perangkat Daerah dalam realisasi anggaran. Juga terkendala dengan perencanaan kegiatan dibidang yang lambat dalam melaksanakan program dan kegiatan sementara penyediaan dana sudah tersedia secara otomatis pad SIPD RI.

Rencana Kerja Perubahan Dinas PP dan PA dengan indikator yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah pada tahun tersebut sebanyak 7 Program terdiri dari dari 1 program Generik dan 6 program wajib.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu 2025 dan realisasi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD .

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Indikator kinerja program Nilai Sakip Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp.13.622.220.063,- dan realisasinya Rp. 11.892.156.653,- atau sebesar 87,30% capaian kinerja 100%. Target kinerja tercapai.
- 2) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Indikator kinerja program adalah Persentase ARG belanja langsung APBD tahun 2024 yaitu dengan anggaran sebesar Rp. 9.060.321.884,- dan realisasinya Rp. 8.446.174.632,- atau sebesar 93,22% capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
- 3) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak indicator kinerja program adalah Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Gender tahun 2023 yaitu dengan anggaran sebesar Rp. 330.718.362,- realisasinya Rp. 318.423.661,-



atau 96.28 % capaian kinerja sebesar 100% . Target kinerja tercapai.

- 4) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Indikator kinerja program adalah Persentase Kabupaten Layak Anak tahun 2024 yaitu dengan anggaran sebesar Rp. 1.130.000.000,- realisasinya Rp. 996.002.742,- atau 88,50 % capaian kinerja sebesar 90% Kendala yang dihadapi adalah :
 - a. Tingkat Pergantian staf yang mengelola dan menangani KLA disetiap perangkat Daerah sering berganti/mutasi.
 - b. Mengikuti jadwal kementerian yg berubah-ubah
 - c. Dukungan semua stekholder belum maksimal.
 - d. Terkendala Letak geografis dan luas Wilayah Kab.Kutai Kartanegara
 - e. Ranah kebijakan Kepala Daerah untuk melakukan mutasi pada jabatan tertentu menjadi hak prerogatif dan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk bisa menyikapi dan memberikan solusi terbaiknya jika terdapat pejabat atau staf yang mengelola dan menangani data persyaratan KLA berganti atau mutasi.
 - f. Sesuai jadwal kementerian
 - g. Surat Edaran Bupati kepada semua stekholder supaya memberikan dukungan untuk mencapai peringkat Kabupaten Layak Anak
 - h. Dengan memberikan sarana dan prasarana dukungan KLA
 - i. Solusi/Rekomendasinya melakukan rapat koordinasi dengan Tim Gugus Tugas KLA untuk memberikan kebijakan sesuai permasalahan.
- 5) Program Peningkatan Kualitas Keluarga Indikator kinerja Persentase peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak tahun 2024 yaitu dengan anggaran sebesar Rp.1.327.816.000,- realisasinya Rp. 1.162.455.849,- atau 87,55% capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
- 6) Program Perlindungan Perempuan Indikator kinerja Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2024 yaitu dengan anggaran sebesar Rp.1.769.431.000,- realisasinya Rp. 1.440.437.056,- atau 81.41% capaian kinerja sebesar 100%. Kendala yang dihadapi :



- a. Waktu pelaksanaan kegiatan yang sering berubah-ubah
 - b. Jangkauan pendampingan jauh dari perkotaan
 - c. Jaringan telekomunikasi yang kurang lancar
 - d. Solusi/Rekomendasinya mengkoordinasikan secara intens dengan pihak terkait supaya penjadwalan sesuai rencana
- 7) Program Perlindungan Khusus Anak Indikator Kinerja Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten tahun 2024 yaitu dengan anggaran sebesar Rp.1.315.700.000,- realisasinya capaian kinerja sebesar Rp.1.059.752.324,- atau 80.55%, capaian kinerja sebesar 100%. Kendala yang dihadapi adalah :
- a. Waktu pelaksanaan kegiatan tidak maksimal sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran terhadap pelayanan perlindungan khusus anak.
 - b. Letak geografis yang jauh dalam penjangkauan kasus yang belum didukung dengan tenaga professional yang masih kurang.
 - c. Solusi/Rekomendasinya rencana anggaran kas tiap triwulan, penambahan tenaga professional dan pemenuhan sarana dan prasarana

Pagu anggaran perubahan tahun 2025 sebesar Rp. 13.424.851.518,- sedangkan pagu anggaran murni sebesar Rp.20.689.737.588,- terjadi penurunan pagu anggaran sebesar 35,11 % disebabkan oleh adanya efisiensi tahap 1 tahap 2 dan tahap 3 serta adanya rasionalisasi.



Tabel 2.1 (TC_29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022
Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD tahun (2022)	Realisasi Renja-PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	76,60	74,59	76,35	74,59	97,69	76,45	72,55	94,9
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34,00	6,00	7,00	7,00	100,00	6,00	19,00	55,88
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	14,00	2,00	3,00	3,00	100,00	2,00	8,00	57,14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,00	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	12,00	60,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	120,00	24,00	24,00	24,00	100,00	24,00	72,00	60,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	60,00



				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	60,00
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	20,00	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	12,00	60,00
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20,00	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	12,00	60,00
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200	53,00	53,00	53,00	100,00	20,00	126,00	63,00
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	21	60,00
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00	60,00	60,00
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	60,00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	3000,00	60,00
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10560,00	2112,00	2112,00	2112,00	100,00	2112,00	6336,00	60,00
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	27,00	1,00	12,00	1,00	8,33	1,00	14,00	51,85



					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265,00	53,00	53,00	53,00	100,00	53,00	159,00	60,00
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	30,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	20,00
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25,00	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00	15,00	60,00
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	60,00
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	60,00
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	175,00	35,00	35,00	35,00	100,00	35,00	105,00	60,00
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	60,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	140,00	28,00	28,00	28,00	100,00	28,00	84,00	60,00



				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	125,00	28,00	30,00	28,00	93,33	25,00	81,00	64,80
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	60,00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
				2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	26,49	8,48	12,18	8,48	69,65	12,18	29,14	110,00
				2.08.02.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang telah dilatih PUG	155,00	52,00	20,00	20,00	260,00	56,00	124,00	80,00
				2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	6,00	1,00	6,00	6,00	100,00	1,00	18,00	300,00
				2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	24,00	1	3,00	3,00	100,00	1	9,00	37,50
				2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	275,00	56	56	56	100,00	56		300,00



				2.08.02.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	275,00	56	56	56	100,00	56	825,00	300,00
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang bergerak dlm bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	150	30	30	30	80,00	30	90	60
				2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	45	9	9	9	62,50	9	27	60
				2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	105	21	21	21	75,00	21	63	60
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	85	27	0	0	0	22	49	57.65
				2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	10	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	40
				2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	60	20	0,00	0,00	0,00	20	20	33,33



				2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	33,33
				2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten	100,00	19,23	28,85	19,23	66,67	12,18	50,64	50,64
				2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	15,00	2,00	3,00	2,00	66,67	2,00	6,00	40,00
				2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	6,00	1,00	1,00	1,00	100,00	3,00	5,00	83,33
				2.08.05.2.01.01 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	9,00	1,00	3,00	1,00	33,33	3,00	5,00	55,60
				2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100,00	58,54	100,00	58,54	58,54	58,54	175,62	175,62
				2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap perempuan	40,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,50
				2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	5,00



				2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi	160,00	41,00	41,00	41,00	100,00	41,00	123,00	51,25
				2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	110,00	50	40,00	40,00	100,00	50	80,00	72,72
				2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30,00	6,00	6,00	6,00	100,00	6,00	18,00	60,00
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	75,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	60,00
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.08.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	60,00



				2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100,00	97,78	100,00	97,78	97,78	97,78	293,34	293,34
				2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah	95,00	14,00	14,00	14,00	100	14,00	42,00	44,21
				2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	7,50
				2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani	515,00	90,00	100,00	90,00	90,00	0,00	180,00	34,95
				2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan KhususTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	190,00	152,00	90,00	127,00	141,11	100,00	409	215,26



				2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	325,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100,00	180,00	53,38
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang dibentuk	135,00	25,00	30,00	25,00	83,33	100,00	50,00	37,04
				2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	50,00	10,00	10,00	10,00	0,00	30,00	40,00	80,00
				2.08.07.2.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	75,00	30,00	30,00	30,00	100,00	0,00	60,00	80,00
				2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	810,00	710,00	730,00	710,00	97,26	30,00	1450,00	179,01
				2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemenuhan hak anak yang terbentuk	21,00	6,00	8,00	8,00	100,00	100,00	114,00	542,85



				2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	8,00	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	8,00	100,00
				2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	13,00	2,00	4,00	5,00	125,00	4,00	11,00	84,62
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan PHA	28,00	1,00	5,00	1,00	20,00	1,00	3,00	10,72
				2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	75,00
				2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12,00	1,00	2,00	2,00	100,00	1,00	4,00	75,00
				2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	75,00
				2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	75,00



				2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	100,00	5,56	11,11	5,56	50,00	5,56	16,68	16,68
				2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	5,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	40,00
				2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	40,00
				2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	18,00	1,00	5,00	1,00	20,00	1,00	3,00	16,67
				2.08.04.2.02.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	65,00	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00	9,00	13,85
				2.08.04.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.08.04.2.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	14,00	1,00	5,00	1,00	20,00	1,00	3,00	21,43



				2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	4,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	75,00
				2.08.04.2.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	7,00	0,00	1,00	1,00	100,00	0,00	1,00	14,28



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dasar pembentukan Dinas PP dan PA Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPPO) untuk memerangi perdagangan orang membutuhkan penanganan yang komperhensif dan multi sektor, diharapkan pemerintah daerah (Kutai Kartanegara) memiliki kerangka hukum mengenai (PTPPPO) dan partisipasi setiap anggota masyarakat termasuk anggota keluarga untuk mengambil langkah pencegahan, untuk data perdagangan orang/trafficking, sebanyak 4 kasus tahun 2017, 1 kasus tahun 2022 dan 8 kasus tahun 2023.

Belum tersedianya pemetaan data khusus untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dengan adanya pemetaan kasus kekerasan ini dapat memudahkan dalam hal penanganan dimasing-masing desa /kecamatan

Perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan *trafficking* dan peningkatan layanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Meski telah ada Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, pembangunan pusat-pusat krisis terpadu di rumah sakit, pembangunan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di



Polda dan Polres, serta pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) di daerah, dan penyebaran informasi dan kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2022 kasus yang didampingi berjumlah 65 kasus dan tahun 2023 sebanyak 155 kasus dan tahun 2024 sebanyak 197 kasus.

Untuk penanganan Korban Tindak Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara terpadu maka perlu dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta penyediaan wadah Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi dalam penanggulangan dan perlindungan Perempuan dan Anak yaitu P2TP2A.

Dilihat dari visi dan misi bupati terpilih untuk RPJMD 2021 – 2026 dengan Misi “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia” dan Visi kedua yaitu “Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya” adapun sasaran yang ingin dicapai Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD;
2. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan);
3. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi pemerintah terkait Kabupaten.

Pada renja Perubahan terdapat efisinsi sebanyak 3 kali ditambah adanya rasionalisasi, sehingga membuat pagu anggaran mengalami penurunan drastis. .



**Tabel 2.2 tentang
Pencapaian Kinerja Pelayanan Organisasi Pelayanan Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Indikator Kinerja Utama	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Proyeksi	
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2025	2026
1	2	3	4	5					6					7	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			76,35	76,40	76,45	76,5	76,60	76,40	74,90	58.89			100,00	100,00
2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		15,90%	16,95	16,00	16,10	16,15	16,20	0,06	4.87	18.74			100,00	100,00
3	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait kabupaten			0,21	0,25	0,29	0,33	0,37	0,21	100	100			100,00	100,00
4	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)			0,015	0,023	0,031	0,039	0,046	6,18	7.2	7.90			100,00	100,00



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha memberikan pelayanan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan visi, misi dan program bupati dan wakil bupati. Dalam upaya pemberian layanan pada masyarakat masih terdapat permasalahan yang disebabkan adanya faktor penghambat. Namun demikian terdapat faktor pendorong yang berkontribusi positif dalam perbaikan layanan, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

No.	Visi	Misi	Masalah	Akar Masalah	Alternatif Pemecahan Masalah	Program
1	2	3	4	5	6	7
	Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya	Masih tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan belum didampingi seluruhnya oleh tenaga terlatih	Belum memiliki pendamping korban tingkat kecamatan/desa	Membentuk kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
				Kurangnya pemahaman masyarakat dampak dari kekerasan pada perempuan dan anak	Memberikan pemahaman ke masyarakat tentang kekerasan dan dampak dari kekerasan pada perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan



No.	Visi	Misi	Masalah	Akar Masalah	Alternatif Pemecahan Masalah	Program
1	2	3	4	5	6	7
			Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap hak-hak anak	Para pengambil kebijakan belum banyak membuat kebijakan yang responsif anak	Mendorong stakeholder untuk responsif terhadap pemenuhan hak anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
						Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
						Program Pemenuhan Hak-Hak Anak
			Kelembagaan PUG di OPD belum Optimal	Masih Banyak ASN yang Belum Memahami Tentang PUG	Fasilitasi dan advokasi kepada OPD beserta seluruh ASN didalamnya untuk implementasi PUG	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
			Rendahnya Angka IPG dan IDG	Belum Optimalnya OPD yang terkait Dengan IPG dan IDG	Sinkronisasi dan Penguatan Indikator Variabel IPG dan IDG oleh Masing Masing OPD Terkait	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
			Belum terwujudnya keadilan dan kesetaraan Gender (KKG) secara maksimal	Rendahnya Pratisipasi terhadap Pembangunan Kesetaraan Gender	Mempercepat Implementasi PUG dan Memperkuat Peran Perempuan dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
			Implementasi Kebijakan masih belum Optimal	Konsistensi terhadap pelaksanaan kebijakan masih kurang	Memperkuat dan Mempertajam pelaksanaan kebijakan terhadap peran, kedudukan dan fungsi pemberdayaan pp dan anak	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
			Kurangnya perempuan sebagai pelaku ekonomi	Akses pp dalam mendapatkan informasi usaha masih sulit. 2. Kurangnya permodalan usaha. 3. Rendahnya kualitas SDM	Memberikan akses Informasi dan kesempatan seluas luasnya bagi perempuan untuk memperoleh bantuan modal serta memberikan bimbingan manajemen usaha	Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan



b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, maka kegiatan pada Dinas PP dan PA Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 mengalami perubahan baik dari jumlah kegiatan dan rencana pagu dana. Adapun jumlah kegiatan dalam tahun 2025 adalah sebanyak 22 Kegiatan dan 7 Program.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Renstra Kementerian dan Provinsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada perubahan terhadap indikator program :

No	Program/Pembangunan	Indikator	Cara Hitung
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Jabatan	Jumlah keterwakilan perempuan dalam jabatan dibagi jumlah jabatan dikali 100
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten	Jumlah PD yang memiliki data gender dibagi jumlah PD dikali 100
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah Perempuan mengalami kekerasan dibagi Jumlah Penduduk Perempuan x100



No	Program/Pembangunan	Indikator	Cara Hitung
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah Anak (Penduduk Usia Kurang dari 18 Tahun korban kekerasan yang ditangani Instansi tingkat Ka/Kota yang didampingi dibagi jumlah Anak (Penduduk Usia Kurang dari 18 Tahun) x 100%
5.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten Layak Anak	Jumlah kecamatan yang menginisiasi KLA dibagi dengan jumlah kecamatan x 100
6.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	

c. Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan tidak Sesuai dengan Rancangan Perubahan RKPD baik jenis, program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

Dalam melakukan perumusan Program dan kegiatan sejauh ini masih sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, Akan tetapi dari penetapan pagu Indikatif terdapat ada beberapa perubahan dalam penyusunan renja Tahun 2025, karena adanya efisiensi 3 tahap dan ditambah adanya rasionalisasi. Pagu Murni tahun 2025 sebesar RP. 20.689.737.588,- sedangkan pagu perubahan 2025 sebesar Rp. 13.424.851.518,- jadi pengurangan pagu tahun 2025 sebesar Rp. 7.264.886.070,-



Tabel 3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Indikator	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1						2	3	5		6	3	5		6		9	10
2	8	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	76,5 Persen	Kutai Kartanegara	9.148.737.588	Nilai Sakip Perangkat Daerah	76,5 Persen	Kutai Kartanegara	7.830.179.999	(1.318.557.589)	76,5 Persen	17.536.189.683
2	8	1	2			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kutai Kartanegara	1.000.000.000	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kutai Kartanegara	484.593.100	(515.406.900)	6 Dokumen	750.000.000
2	8	1	2	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Kutai Kartanegara	450.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Kutai Kartanegara	238.836.100	(211.163.900)	3 dokumen	200.000.000
2	8	1	2	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	Kutai Kartanegara	50.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	Kutai Kartanegara	25.200.000	(24.800.000)	3 laporan	150.000.000
2	8	1	2	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	Kutai Kartanegara	150.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	Kutai Kartanegara	65.050.000	(84.950.000)	1 laporan	150.000.000
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	Kutai Kartanegara	50.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	Kutai Kartanegara	23.629.800	(26.370.200)	1 dokumen	50.000.000
Rencana Kerja Perubahan Dinas PP dan PA Tahun 2025																	

Rencana Kerja Perubahan Dinas PP dan PA Tahun 2025



						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Kutai Kartanegara	25.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Kutai Kartanegara	117.196.000	92.196.000	1 laporan	25.000.000
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Kutai Kartanegara	25.000.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Kutai Kartanegara	10.604.000	(14.396.000)	1 dokumen	25.000.000
2	8	1	2			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Laporan	Kutai Kartanegara	105.000.000	Jumlah laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Laporan	Kutai Kartanegara	57.616.000	(47.384.000)	1 Laporan	105.000.000
2	8	1	2	5		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	Kutai Kartanegara	25.000.000	Jumlah laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	Kutai Kartanegara	10.868.000	(14.132.000)	1 dokumen	25.000.000
						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	Kutai Kartanegara	50.000.000	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	Kutai Kartanegara	21.758.000	(28.242.000)	1 laporan	50.000.000
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	Kutai Kartanegara	30.000.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	Kutai Kartanegara	24.990.000	(5.010.000)	1 laporan	30.000.000
2	8	1	2			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	2 Layanan	Kutai Kartanegara	70.000.000	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	2 Layanan	Kutai Kartanegara	69.724.250	(275.750)	2 Layanan	569.724.250



2	8	1	2	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	Kutai Kartanegara	70.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	Kutai Kartanegara	69.724.250	(275.750)	40 orang	69.724.250
2	8	1	2			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	7 Layanan	Kutai Kartanegara	439.500.000	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	7 Layanan	Kutai Kartanegara	389.759.192	(49.740.808)	7 Layanan	1.800.000.000
2	8	1	2	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Kutai Kartanegara	60.000.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Kutai Kartanegara	56.873.600	(3.126.400)	1 paket	150.000.000
2	8	1	2	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Kutai Kartanegara	5.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Kutai Kartanegara	29.992.100	24.992.100	1 paket	200.000.000
2	8	1	2	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Kutai Kartanegara	8.500.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Kutai Kartanegara	19.241.152	10.741.152	1 paket	200.000.000
2	8	1	2	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	Kutai Kartanegara	159.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	Kutai Kartanegara	153.411.540	(5.588.460)	1 dokumen	50.000.000
2	8	1	2	8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	Kutai Kartanegara	50.000.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	Kutai Kartanegara	38.087.000	(11.913.000)	1 laporan	150.000.000
2	8	1	2	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Kutai Kartanegara	117.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Kutai Kartanegara	52.153.800	(64.846.200)	1 laporan	500.000.000
2	8	1	2	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	Kutai Kartanegara	40.000.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	Kutai Kartanegara	40.000.000	-	1 dokumen	250.000.000

Rencana Kerja Perubahan Dinas PP dan PA Tahun 2025



2	8	1	2			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	30 Unit	Kutai Kartanegara	79.674.000	Jumlah pengadaan barang milik daerah	30 Unit	Kutai Kartanegara	78.835.200	(838.800)	51 Unit	3.100.000.000
2	8	1	2	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 unit	Kutai Kartanegara	79.674.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 unit	Kutai Kartanegara	78.835.200	(838.800)	30 unit	300.000.000
2	8	1	2			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	Kutai Kartanegara	618.900.356	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	Kutai Kartanegara	376.875.511	(242.024.845)	3 Laporan	2.250.000.000
2	8	1	2	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	Kutai Kartanegara	182.511.720	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	Kutai Kartanegara	116.670.253	(65.841.467)	1 laporan	350.000.000
2	8	1	2	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	Kutai Kartanegara	40.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	Kutai Kartanegara	39.450.000	(550.000)	1 laporan	100.000.000
2	8	1	2	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	Kutai Kartanegara	396.388.636	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	Kutai Kartanegara	220.755.258	(175.633.378)	1 laporan	1.800.000.000
2	8	1	2			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	37 Unit	Kutai Kartanegara	95.000.000	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	37 Unit	Kutai Kartanegara	94.776.000	(224.000)	37 Unit	1.950.000.000



2	8	1	2	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	Kutai Kartanegara	72.964.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	Kutai Kartanegara	72.740.000	(224.000)	30 unit	300.000.000
2	8	1	2	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 unit	Kutai Kartanegara	22.036.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 unit	Kutai Kartanegara	22.036.000	-	4 unit	150.000.000
2	8	2				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	16,1 Persen	Kutai Kartanegara	2.100.000.000	Cakupan Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	16,1 Persen	Kutai Kartanegara	874.299.660	(1.225.700.340)	16,1 Persen	3.000.000.000
2	8	2	2	1		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota	56 Lembaga	Kutai Kartanegara	750.000.000	Jumlah dokumen pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota	56 Lembaga	Kutai Kartanegara	191.585.026	(558.414.974)	56 Lembaga	950.000.000
2	8	2	2	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kutai Kartanegara	250.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kutai Kartanegara	61.381.384	(188.618.616)	1 Dokumen	250.000.000



	8	2	2	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	Kutai Kartanegara	100.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	Kutai Kartanegara	37.171.842	(62.828.158)	1 laporan	250.000.000
2	8	2	2	1	6	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	40 orang	Kutai Kartanegara	200.000.000	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	40 orang	Kutai Kartanegara	66.161.300	(133.838.700)	40 orang	250.000.000
2	8	2	2	1	8	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	20 orang	Kutai Kartanegara	200.000.000	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	20 orang	Kutai Kartanegara	26.870.500	(173.129.500)	40 orang	200.000.000
2	8	2	2	2		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang bergerak dlm bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	28 Organisasi	Kutai Kartanegara	700.000.000	Jumlah Perempuan yang bergerak dlm bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	28 Organisasi	Kutai Kartanegara	394.988.734	(305.011.266)	28 Organisasi	700.000.000
2	8	2	2	2	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kutai Kartanegara	150.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kutai Kartanegara	37.721.774	(112.278.226)	1 Dokumen	350.000.000



2	8	2	2	2	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Organisasi	Kutai Kartanegara	550.000.000	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Organisasi	Kutai Kartanegara	357.266.960	(192.733.040)	28 Organisasi	350.000.000
2	8	2	2	3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	28 lembaga	Kutai Kartanegara	650.000.000	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	28 lembaga	Kutai Kartanegara	287.725.900	(362.274.100)	28 lembaga	1.350.000.000
2	8	2	2	3	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 orang	Kutai Kartanegara	250.000.000	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 orang	Kutai Kartanegara	125.387.900	(124.612.100)	40 orang	500.000.000
2	8	2	2	3	4	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	28 Lembaga	Kutai Kartanegara	300.000.000	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	28 Lembaga	Kutai Kartanegara	155.038.000	(144.962.000)	28 Lembaga	700.000.000



2	8	2	2	3	6	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Kutai Kartanegara	100.000.000	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Kutai Kartanegara	7.300.000	(92.700.000)	1 Dokumen	150.000.000
2	8	3				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100 Persen	Kutai Kartanegara	2.100.000.000	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100 Persen	Kutai Kartanegara	734.344.020	(1.365.655.980)	100 Persen	2.200.000.000
2	8	3	2	1		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap perempuan	2 Dokumen	Kutai Kartanegara	700.000.000	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap perempuan	2 Dokumen	Kutai Kartanegara	197.565.500	(502.434.500)	2 Dokumen	700.000.000
2	8	3	2	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	Kutai Kartanegara	400.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	Kutai Kartanegara	91.479.200	(308.520.800)	2 dokumen	400.000.000



2	8	3	2	1	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 perangkat daerah	Kutai Kartanegara	300.000.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 perangkat daerah	Kutai Kartanegara	106.086.300	(193.913.700)	11 perangkat daerah	300.000.000
2	8	3	2	2		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan	Kutai Kartanegara	700.000.000	Jumlah penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan	Kutai Kartanegara	327.896.920	(372.103.080)	6 Layanan	700.000.000
2	8	3	2	2	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 orang	Kutai Kartanegara	500.000.000	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 orang	Kutai Kartanegara	237.969.880	(262.030.120)	50 orang	500.000.000
2	8	3	2	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 layanan	Kutai Kartanegara	200.000.000	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 layanan	Kutai Kartanegara	89.927.040	(110.072.960)	10 layanan	200.000.000



2	8	3	2	3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota	6 Layanan	Kutai Kartanegara	700.000.000	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota	6 Layanan	Kutai Kartanegara	208.881.600	(491.118.400)	6 Layanan	800.000.000
2	8	3	2	3	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kutai Kartanegara	100.000.000	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kutai Kartanegara	-	(100.000.000)	1 dokumen	200.000.000
2	8	3	2	3	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 orang	Kutai Kartanegara	300.000.000	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 orang	Kutai Kartanegara	79.270.600	(220.729.400)	30 orang	300.000.000
2	8	3	2	3	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	50 orang	Kutai Kartanegara	50.000.000	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	50 orang	Kutai Kartanegara	49.992.400	(7.600)	50 orang	50.000.000



2	8	3	2	3	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kutai Kartanegara	250.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kutai Kartanegara	79.618.600	(170.381.400)	1 dokumen	250.000.000
2	8	4				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pusat pembelajaran keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan hak anak	50 Persen	Kutai Kartanegara	1.300.000.000	Persentase pusat pembelajaran keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan hak anak	50 Persen	Kutai Kartanegara	353.909.340	(946.090.660)	50 Persen	1.600.000.000
2	8	4	2	1		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	Kutai Kartanegara	550.000.000	Jumlah peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	Kutai Kartanegara	104.620.400	(445.379.600)	3 dokumen	550.000.000
2	8	4	2	1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	200.000.000	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	60.742.400	(139.257.600)	5 Perangkat Daerah	200.000.000



2	8	4	2	1	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	Kutai Kartanegara	150.000.000	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	Kutai Kartanegara	-	(150.000.000)	4 Dokumen	150.000.000
2	8	4	2	1	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	Kutai Kartanegara	200.000.000	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	Kutai Kartanegara	43.878.000	(156.122.000)	3 Laporan	200.000.000
2	8	4	2	2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	6 Lembaga	Kutai Kartanegara	750.000.000	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	6 Lembaga	Kutai Kartanegara	249.288.940	(500.711.060)	6 Lembaga	1.050.000.000
2	8	4	2	2	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	4 Lembaga	Kutai Kartanegara	150.000.000	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	4 Lembaga	Kutai Kartanegara	53.344.000	(96.656.000)	4 Lembaga	300.000.000



2	8	4	2	2	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kutai Kartanegara	400.000.000	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kutai Kartanegara	166.462.600	(233.537.400)	50 Orang	400.000.000
2	8	4	2	2	3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kutai Kartanegara	200.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kutai Kartanegara	29.482.340	(170.517.660)	2 Dokumen	350.000.000
2	8	5				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak	81,03 Persen	Kutai Kartanegara	250.000.000	Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak	81,03 Persen	Kutai Kartanegara	120.731.500	(129.268.500)	81,03 Persen	250.000.000
2	8	5	2	1		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Kutai Kartanegara	250.000.000	Jumlah pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Kutai Kartanegara	120.731.500	(129.268.500)	4 Dokumen	250.000.000
2	8	5	2	1	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Kutai Kartanegara	150.000.000	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Kutai Kartanegara	73.871.500	(76.128.500)	1 Dokumen	150.000.000



2	8	5	2	1	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kutai Kartanegara	100.000.000	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kutai Kartanegara	46.860.000	(53.140.000)	1 Dokumen	100.000.000
2	8	6				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	780 Nilai	Kutai Kartanegara	2.541.000.000	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	780 Nilai	Kutai Kartanegara	1.821.120.820	(719.879.180)	780 Nilai	1.285.000.000
2	8	6	2	1		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kutai Kartanegara	400.000.000	Jumlah pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kutai Kartanegara	-	(400.000.000)	2 Dokumen	400.000.000
2	8	6	2	1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	Kutai Kartanegara	250.000.000	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	Kutai Kartanegara	-	(250.000.000)	30 Organisasi	250.000.000
2	8	6	2	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kutai Kartanegara	150.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kutai Kartanegara	-	(150.000.000)	2 Dokumen	150.000.000



2	8	6	2	2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Kutai Kartanegara	2.141.000.000	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Kutai Kartanegara	1.821.120.820	(319.879.180)	4 Dokumen	885.000.000
2	8	6	2	2	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	Kutai Kartanegara	1.606.000.000	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	Kutai Kartanegara	1.591.256.660	(14.743.340)	300 Orang	250.000.000
2	8	6	2	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kutai Kartanegara	150.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kutai Kartanegara	55.548.800	(94.451.200)	2 Dokumen	150.000.000
2	8	6	2	2	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Kutai Kartanegara	185.000.000	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Kutai Kartanegara	67.520.000	(117.480.000)	4 Dokumen	185.000.000



2	8	6	2	2	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	kutai Kartanegara	200.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	kutai Kartanegara	106.795.360	(93.204.640)	7 Dokumen	300.000.000
2	8	7				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100 Persen	Kutai Kartanegara	3.250.000.000	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100 Persen	Kutai Kartanegara	1.690.266.179	(1.559.733.821)	100 Persen	3.750.000.000
2	8	7	2	1		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	Kutai Kartanegara	800.000.000	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	Kutai Kartanegara	330.705.700	(469.294.300)	2 dokumen	800.000.000
2	8	7	2	1	4	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50 orang	Kutai Kartanegara	300.000.000	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50 orang	Kutai Kartanegara	142.855.500	(157.144.500)	30 orang	300.000.000
						Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	2 dokumen	Kutai Kartanegara	500.000.000	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	2 dokumen	Kutai Kartanegara	187.850.200	(312.149.800)	2 dokumen	



2	8	7	2	2		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	6 Layanan	Kutai Kartanegara	1.250.000.000	Jumlah penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	6 Layanan	Kutai Kartanegara	938.139.899	(311.860.101)	6 Layanan	1.600.000.000
2	8	7	2	2	5	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 orang	Kutai Kartanegara	1.000.000.000	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	100 orang	Kutai Kartanegara	813.462.699	(186.537.301)	100 orang	1.000.000.000
2	8	7	2	2	6	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	6 layanan	Kutai Kartanegara	250.000.000	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	6 layanan	Kutai Kartanegara	124.677.200	(125.322.800)	25 layanan	250.000.000
2	8	7	2	3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang dibentuk	2 Dokumen	Kutai Kartanegara	1.200.000.000	Jumlah lembaga layanan anak yang dibentuk	2 Dokumen	Kutai Kartanegara	421.420.580	(778.579.420)	2 Dokumen	1.350.000.000
2	8	7	2	3	5	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 Kegiatan	Kutai Kartanegara	400.000.000	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 Kegiatan	Kutai Kartanegara	121.853.800	(278.146.200)	2 Kegiatan	300.000.000



2	8	7	2	3	6	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	50 orang	Kutai Kartanegara	300.000.000	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	50 orang	Kutai Kartanegara	90.683.200	(209.316.800)	50 orang	300.000.000
						Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	2 Dokumen	kutai Kartanegara	250.000.000	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	2 Dokumen	kutai Kartanegara	106.258.030	(143.741.970)	2 Dokumen	250.000.000
						Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	1 dokumen	Kutai Kartanegara	250.000.000	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	1 dokumen	Kutai Kartanegara	102.625.550	(147.374.450)	1 dokumen	250.000.000
							Jumlah			20.689.737.588				13.424.851.518	(7.264.886.070)		29.621.189.683



BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. Adapun proses penyusunan RKPD Tahun 2025 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja pemerintah, maka dengan beberapa catatan sebagai berikut :

a) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

1. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum memadai terutama untuk keperluan printer dan komputer yang sudah banyak mengalami rusak berat.
2. Keadaan kantor yang masih belum representatif untuk menyelenggarakan organisasi dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak khususnya ruangan untuk menangani kekerasan perempuan dan anak serta keperluan ruang arsip dan ruang barang rusak.
3. Ketiadaan sumber daya aparatur yang khusus untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan dari segi psikologis menjadikan kendala bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara dalam operasional organisasi.
4. Banyak lokasi korban kekerasan pada perempuan dan anak yang memerlukan biaya besar untuk dijangkau.
5. Mall Pelayanan Perempuan dan Anak (MPPA) yang masih memerlukan bangunan fasilitas sapsras dan SDM

b) Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak disesuaikan dengan adanya Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditunjuk langsung oleh Presiden RI melalui Kementerian PPPA RI pada Tahun 2006 bersama empat kabupaten/kota menjadi kabupaten menuju Kabupaten Layak Anak (Sidoarjo, Gorontalo, Jambi, Solo, dan Kutai Kartanegara) diperkuat dengan Instruksi Bupati Kutai Kartanegara nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kecamatan dan Kelurahan/ Desa. Dalam menentukan arah jalannya organisasi salah satunya



adalah Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- c) Rencana Tindak Lanjut.
1. Mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pendirian aktifis Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) di setiap kecamatan dan di setiap desa ataupun kelurahan.
 2. Mendorong upaya pembinaan pelaku usaha perempuan dalam rangka meningkatkan perekonomian perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara
 3. Mendorong OPD baik OPD di Kabupaten maupun OPD kecamatan untuk menginisiasi Kecamatan Layak Anak
 4. Mendorong Pembangunan Mall Pelayanan Perempuan dan Anak (MPPA) di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh disiplin, dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* khususnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 03 September 2025

Plt.Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Kutai Kartanegara



H.Hero Suprayetno.S.Sos..M.Si.
NIP. 19711122 200003 1 002